



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.1, Juni 2017

TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Devi Darmawan, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Aisah Putri Budiatri	1–15
• Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Wasisto Raharjo Jati	17–29
• Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Dina Fadiyah	31–44
• Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta Septi Satriani	45–54
• Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan Siswanto	55–68
Resume Penelitian	
• Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto, dkk	85–98
Review Buku	
• Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan Anggi Afriansyah	99–106
Tentang Penulis	107–108
Pedoman Penulisan	109–113

CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, "Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru", memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, "Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia". Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel "Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012" yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel "Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta" yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang "Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan" yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang ter subordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarkan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

Kata kunci: Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

**KUASA MERAH SUARA: RELASI
FOKE-NARA DAN FORUM
KOMUNIKASI ANAK BETAWI
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA
DKI JAKARTA 2012**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Kata kunci: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN DAN SERAT
KEKANCINGAN: SEBUAH
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON
YOGYAKARTA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Kata kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83

Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

Kata kunci: ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

DDC: 327.51

Siswanto

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN
INSTRUMEN KEKUASAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15

The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.

Keywords: *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY

PILLAR IN INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29

This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.

Keyword: *Democratization, Middle Class, Society.*

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA

This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.

Keywords: Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN AND SERAT
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA
PALACE**

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan, they will behave according to the value that contained by them.

Keywords: Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**THE TRANSFORMATION OF
PANCASILA AND INDONESIAN
IDENTITY**

The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.

Keywords: Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE ROLE OF IMT-GT
COOPERATION IN THE ASEAN
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

Keywords: ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

DDC: 327.51

Siswanto

**INDONESIAN FOREIGN POLICY
TOWARD CHINA:
FIGHTING THE NATIONAL
INTERESTS IN ASYMMETRIC
POWER RELATIONS**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98

This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations

such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)

Keywords: Foreign policy, power imbalance, national interest

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**LANGUAGE AS FIELD AND
INSTRUMENTS OF POWER**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.

Keywords: Language, politic, power, Indonesia

DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU

THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA

Aisah Putri Budiatri

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: aisahputrib@gmail.com

Diterima: 21 Maret 2017; direvisi: 20 April 2017; disetujui: 9 Juni 2017

Abstract

The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.

Keywords: *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, Conflict, post-New Order*

Abstrak

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Kata kunci: Identitas, Papua, Kepapuaan, Keindonesiaan, Konflik, pasca-Orde Baru

Pendahuluan

Identitas politik pada wilayah-wilayah yang mengalami konflik memiliki kekhususan yang berbeda dengan daerah non-konflik. Identitas mereka terbentuk dan dipengaruhi tidak hanya oleh nilai-nilai etnisitas dan kultural saja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi politik-ekonomi

dan kekerasan yang dihadapi oleh mereka selama konflik berlangsung.¹ Identitas orang-orang Papua menjadi salah wujud nyata yang menggambarkan bagaimana konteks sejarah,

¹ Markus V. Honhe, "Political Identity, Emerging State Structures and Conflict in Northern Somalia," *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 44, No. 3, (September 2006), hlm. 397-398.

kondisi politik-ekonomi dan kekerasan yang dialami selama konflik berlangsung mampu berdampak pada terbentuknya identitas seseorang dan komunitasnya. Konflik Papua sebagai salah satu konflik yang paling rumit dan terlama di Indonesia memberikan narasi penting pada kajian tentang identitas. Berbagai studi tentang identitas orang Papua telah dilakukan, baik oleh peneliti/akademisi dalam negeri maupun luar negeri. Kebanyakan studi tersebut berfokus pada ‘mengapa dan bagaimana identitas politik orang Papua terbentuk dan berkembang?’ Jawaban atas pertanyaan kajian itu beragam, tetapi umumnya para akademisi merujuk pada kondisi politik-ekonomi dan konflik yang berlangsung pada masa kolonial Belanda dan Orde Baru.

Berbagai kajian tentang identitas orang Papua memperlihatkan identitas kepapuaan yang menjadi antitesa dari identitas keindonesiaan. Identitas kepapuaan ini, oleh Drooglever, Chauvel, dan Widjojo, dinyatakan mulai terbentuk pada masa kolonialisasi Belanda. Pada saat itu, orang Papua merasakan intimidasi dan dipandang rendah oleh orang Indonesia yang digunakan oleh Belanda sebagai tenaga birokrat dan administrasi kolonial.² Ditambah lagi, proses integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Indonesia yang dinilai tidak melibatkan orang Papua berakibat pada munculnya identitas orang Papua yang berseberangan dengan Indonesia.³ Berbeda dengan pandangan yang memusatkan perhatian pada konteks kolonialisasi dan sejarah integrasi Papua, McGibbon berpandangan bahwa identitas kepapuaan menguat justru setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan kebijakan migrasi di bawah Pemerintahan Suharto pada era Orde Baru yang tidak membawa kesejahteraan bagi orang Papua, bahkan cenderung dinilai mengeksploitasi Orang Asli Papua (OAP) telah mendorong tumbuh

suburnya identitas kepapuaan yang anti terhadap Indonesia.⁴

Hal yang menarik tentang studi identitas Papua adalah meskipun kajian tersebut dilakukan pada era pasca-Orde Baru, namun temuan-temuan mereka umumnya melihat hubungan antara identitas Papua dengan kondisi saat dan sebelum Orde Baru. Hingga saat ini belum ada kajian yang secara lengkap menggambarkan bagaimana perkembangan identitas kepapuaan pasca Pemerintahan Suharto tumbang dan sistem demokrasi mulai diterapkan di Indonesia. Padahal, periode pasca-Orde Baru sangat menarik untuk diulas mengingat banyak kebijakan baru pemerintah yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan OAP dan meningkatkan kesejahteraan OAP. Asumsinya, apabila kebijakan-kebijakan itu berhasil maka identitas kepapuaan yang berkembang akibat ketidakpuasan OAP terhadap Indonesia akan semakin melemah. Sebaliknya, identitas keindonesiaan orang Papua pun semakin meningkat.

Artikel ini akan berupaya menjawab hal yang selama ini luput dikaji, yakni ‘bagaimanakah perkembangan identitas Orang Papua pasca-Orde Baru?’ Hasil kajian artikel ini menarik karena kondisi pasca-Orde Baru memperlihatkan adanya trend yang sama dengan kondisi sebelumnya, dimana identitas kepapuaan yang antitesis dengan identitas keindonesiaan menguat. Kondisi ini terjadi akibat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua dan orang Papua berjalan kurang efektif, masih berlangsungnya tindak kekerasan, serta tidak tuntasnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Hal ini tentu bertolak belakang dengan asumsi bahwa kebijakan pasca-Orde Baru akan berdampak pada melemahnya identitas kepapuaan sebagai identitas yang bertolak belakang dengan identitas keindonesiaan. Tidak hanya itu, pada era reformasi ini, nampak identitas kepapuaan sebagai antitesis identitas keindonesiaan semakin dipertajam dengan pelekatan diri orang Papua sebagai bagian dari

² Pieter Drooglever, *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua*, (Oxford, UK: Oneworld Publications, 2009), hlm. 748.

³ Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, (Washington, D.C.: East-West Center Washington, 2005), hlm. 47-48; Muridan S. Widjojo (ed.), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 15.

⁴ Rodd McGibbon, *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Place in Australia-Indonesia Relations*, (New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006), hlm. 16.

komunitas melanesia di negara-negara pasifik, dan bukan bagian dari Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang melayu.

Artikel ini terbagi menjadi beberapa bagian tulisan. Sebagai pembuka, maka bagian awal tulisan ini akan memperlihatkan alasan mendasar mengapa topik pembahasan tentang identitas orang Papua pasca-Orde Baru menjadi penting untuk dibahas. Selain itu, pada bagian pendahuluan ini juga dipaparkan temuan penting dari hasil riset ini. Kemudian, pada bagian tulisan selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana lahir dan tumbuhnya identitas kepapuaan pada masa kolonial dan Orde Baru. Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran dasar tentang proses perkembangan awal identitas kepapuaan, sekaligus untuk menyampaikan diskusi dan temuan yang telah ada mengenai identitas orang Papua. Selanjutnya, tulisan akan dilanjutkan dengan analisis tentang dinamika identitas Papua pasca-Pemerintahan Suharto runtuh pada 1998 (pasca-Orde Baru).

Lahir dan Tumbuhnya Dikotomi Identitas Papua pada Masa Kolonial dan Era Orde Baru

Sudah sejak awal 1960-an, Tanah Papua dirundung oleh konflik yang tak berkesudahan hingga kini. Konflik diwarnai oleh keinginan untuk memerdekakan diri dan melepaskan Papua dari Indonesia.⁵ Konflik ini tentu tidak terlepas dari identitas politik yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa orang Papua. Berbagai studi yang dilakukan oleh Pieter Drooglever, Richard Chauvel, Rodd McGibbon, dan Muridan Widjojo (Tim Kajian Papua LIPI) mengkaji identitas orang Papua dengan narasi adanya dua identitas yang saling bertolak belakang yakni kepapuaan dan keindonesiaan. Identitas Kepapuaan, menurut Muridan Widjojo, adalah perasaan satu identitas sebagai orang Papua yang disatukan oleh memori penderitaan kolektif dan kongruensi aspirasi yang bersumber dari mitologi suku-suku bangsa tentang milenium baru dan

⁵ Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*, (Washington D.C.: East-West Center Washington, 2004), hlm 22; Budi J. Hernawan, "Terror, Resistance, and Trauma in Papua (Indonesia)," *Centre for International Governance and Justice Issues Paper 14*, (2009), hlm. 3.

mesianisme. Istilah kepapuaan yang berdiri dari kata 'Papua' sesungguhnya merupakan bentuk alternatif dari 'Irian Jaya' yang identik dengan kondisi intimidasi oleh Pemerintahan Indonesia.⁶ Identitas kepapuaan ini ditempatkan sebagai antitesa dari identitas keindonesiaan, yang artinya berbeda dan bukan menjadi bagian dari identitas keindonesiaan.⁷

Secara historis, orang Papua pada mulanya tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai 'orang Papua,' melainkan menyebut diri dengan nama lokal masing-masing wilayah/sukunya. Misalnya, mereka menyebut dirinya sebagai orang Biak, Serui, Raja Ampat dan lainnya. Sementara Papua menjadi istilah yang digunakan oleh orang dari luar Papua untuk menyebut orang asli di tanah yang oleh Belanda pada abad ke-16 disebut Nova Guinea dan/atau Nieuw Guinea.⁸ Kolonial Belanda, termasuk orang Indonesia yang bekerja untuk Belanda, memperkenalkan istilah Papua hingga akhirnya pada abad XX, orang Papua mulai menyebut dirinya sebagai 'orang Papua.'⁹

Pemaknaan diri sebagai orang Papua ini kemudian menumbuhkan identitas kepapuaan di antara mereka. Identitas kepapuaan ini muncul juga tidak terlepas dari pengaruh sistem kolonialisme Belanda di Tanah Papua. Setelah Belanda mendapatkan pengakuan internasional atas kekuasaannya di wilayah Timur Indonesia hingga daerah Papua, Belanda mulai menjalankan ekspansi budaya dan ekonomi di wilayah-wilayah pantai Papua.¹⁰ Untuk menjalankan ekspansi dan kolonialisasi tersebut, Belanda memberlakukan sistem 'dual kolonialisme.' Sistem ini memberikan dua level kekuasaan yang berbeda dalam pengelolaan administrasi pemerintah kolonial. Dalam sistem ini, orang-orang Belanda ditempatkan pada posisi senior

⁶ Al Rahab, Amiruddin, "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke-Papua-an Versus Ke-Indonesia-an," *Jurnal Dignitas*, Vol. III, No. 1, (2005).

⁷ Identitas keindonesiaan secara sederhana dapat dimaknai sebagai identitas yang melekat pada individu maupun kolektif sebagai orang dan Bangsa Indonesia. Lihat: Widjojo (ed.), *Op.cit.*, hlm. 33.

⁸ *Ibid.* hlm. 56.

⁹ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁰ Drooglever. 2009. *Op.cit.*, hlm. 748.

dan elit pada posisi administrasi dan organisasi misionari, sementara pada posisi tengah dan bawah sebagai staf administrasi, polisi, guru dan misionaris dijalankan oleh orang Indonesia yang ditempatkan Belanda di Papua. Mayoritas orang-orang Indonesia itu berasal dari Maluku, yakni orang Ambon dan Kai; ada pula sebagian lainnya (minoritas) adalah orang Manado. Sistem dual kolonialisme ini lah yang menjadi akar dari lahirnya identitas kepapuaan.¹¹

Sistem dual kolonialisasi ini hanya diterapkan di Papua, tidak di wilayah jajahan Belanda lainnya. Di wilayah lain di Indonesia, misalnya, Belanda mengkooptasi elit-elit lokal asli daerah itu untuk dijadikan sebagai pegawai tingkat menengah dan rendah. Sementara itu, di Papua, tidak ada elit lokal yang menjadi bagian dari sistem kolonialisasi yang dibangun Belanda hingga bertahun-tahun setelahnya.¹² Situasi ini menimbulkan kecemburuan dari orang Papua terhadap orang Indonesia karena posisi administrasi pemerintahan yang ‘seharusnya’ dimiliki oleh mereka, nyatanya ditempatkan oleh orang dari luar Papua.¹³

Sistem dual kolonialisme juga membentuk sebuah kondisi dimana segala bentuk penerapan kebijakan kolonial menghadapi secara langsung orang Indonesia dengan orang Papua. Orang Belanda memiliki jarak terhadap orang Papua karena interaksi yang dilakukan oleh kelompok elit Belanda jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dijalankan oleh orang Indonesia. Oleh karenanya, orang Indonesia lebih lekat dengan gambaran ‘kolonial’ dibandingkan orang Belanda. Orang Papua kemudian menilai bahwa orang Indonesia hadir dan memberikan perlakuan yang sangat merendahkan kepada orang Papua, padahal mereka adalah orang asli di Tanah Papua. Orang Papua merasa dinilai rendah, bodoh dan kotor oleh orang Indonesia. Mereka juga menafsirkan bahwa kehadiran orang Indonesia akan secara sengaja menghambat kemajuan orang asli Papua.¹⁴

Suasana yang diakibatkan oleh sistem dual kolonialisme tersebut pada akhirnya menciptakan sentimen orang Papua yang anti terhadap orang Indonesia. Chauvel menyebutkan bahwa dalam situasi ini kemudian muncul yang dinamakan ‘ekspresi persaingan antagonisme’ antara orang asli Papua terhadap orang Indonesia.¹⁵ Orang Indonesia kemudian diposisikan sebagai pendatang atau *amber*, yang menjajah Tanah Papua.¹⁶ Sentimen-anti amber ini semakin meningkat pada Perang Dunia II karena jumlah orang-orang Maluku yang didatangkan ke Papua semakin meningkat karena Belanda menggunakan mereka sebagai pasukan penghalau tekanan dari Jepang.¹⁷ Sentimen ini kemudian menumbuhkan solidaritas anti-amber, yang kemudian akhirnya melahirkan identitas kepapuaan.

Sistem dual kolonialisasi berubah setelah Perang Pasifik berlangsung dan disusul dengan kemerdekaan Indonesia. Belanda mulai mendidik orang-orang Papua dan bagi yang sudah lulus pendidikan kemudian ditempatkan di kantor-kantor kolonial Belanda di Papua. Di bawah seorang komisioner Belanda bernama Van Eechoud, Belanda mengumpulkan elit-elit Papua untuk menjadi pemimpin Papua. Pusat kegiatan birokrasi Belanda tidak lagi dipusatkan di Jakarta atau Ambon, tetapi di Jayapura.¹⁸ Belanda tidak lagi mengesampingkan orang Papua dan Tanah Papua, sebaliknya Belanda menempatkan dalam posisi yang penting dan diberikan perhatian yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dengan kondisi ini, orang Papua tidak memosisikan orang Belanda sebagai penjajah layaknya dulu dilekatkan pada orang Indonesia. Orang Belanda justru dipandang sebagai pihak yang mau mendidik orang Papua dan membangun Tanah Papua.¹⁹

Pengalaman di bawah kolonialisasi Belanda telah membentuk identitas kepapuaan tumbuh menjadi antitesa dari identitas keindonesiaan. Indonesia dianggap oleh orang Papua sebagai

¹¹ *Ibid.* hlm. 748; Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm.57-58; Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm. 42.

¹² Chauvel. 2005. *Ibid.*, hlm. 42.

¹³ *Ibid.*, hlm. 43-44.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 43-44; Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm.57-58.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm.58.

¹⁷ Drooglever. 2009. *Op.cit.*, hlm. 748.

¹⁸ Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm. 44.

¹⁹ Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm.58.

kolonial mereka yang sesungguhnya, sementara orang Belanda dimuliakan sebagai pemberi kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya sistem dual kolonialisasi dan sistem yang berlaku pasca-Indonesia merdeka adalah strategi bagi Belanda untuk mempertahankan Papua dibawah kekuasaannya. Upaya mengangkat orang Papua oleh Belanda serta menempatkan pusat pemerintahan kolonialnya di Jayapura pada tahun 1950-an khususnya dilakukan untuk tetap menguasai Papua dan untuk menolak klaim Indonesia bahwa Papua adalah bagian darinya.²⁰

Identitas kepapuaan ini semakin menguat sekitar tahun 1960an, yakni menjelang dan saat proses integrasi Papua dengan Indonesia berlangsung. Saat Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, orang Papua berharap bahwa perubahan orientasi membangun Belanda akan berakhir pada kemerdekaan Papua, apalagi ketika itu majelis New Guinea telah dibentuk. Majelis New Guinea dinilai sebagai cikal bakal manifesto keinginan orang Papua untuk merdeka, menentukan lagu kebangsaan, menentukan bendera Papua, serta memproklamasikan Tanah kemerdekaan Papua. Pada 1 Desember 1961, pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan Bendera Belanda, yang kemudian dinyatakan sebagai tanggal deklarasi kemerdekaan Papua bahkan telah dilakukan. Namun, kemerdekaan ini tidak mendapatkan pengakuan dari Indonesia dan dunia internasional.²¹ Alih-alih merdeka, Papua justru menjalani proses integrasi menjadi bagian dari Indonesia melalui referendum pada tahun 1969.

Meskipun identitas kepapuaan tumbuh sebagai antitesis keindonesiaan, namun orang Indonesia selalu melihat bahwa Papua adalah bagian dari negara kesatuannya. Papua yang juga dijajah oleh Belanda menjadikannya sama dengan wilayah lain di Indonesia.²² Oleh karenanya, sejak masa awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk merebut kedaulatan atas Papua dari Belanda. Diskusi antara Indonesia dengan Belanda tentang Papua sudah dimulai

sejak Konferensi Meja Bundar pada 1949. Namun baru pada tahun 1962, proses transfer dimulai dengan ditandatanganinya *New York Agreement* antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1963 pun, Indonesia mulai memasuki kembali Papua hingga akhirnya secara sah memiliki kedaulatan atas Papua pada November 1969, yakni setelah mayoritas dari 1025 orang Papua menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).²³

Meskipun hasil referendum telah diakui secara internasional, tetapi tidak semua pihak di Papua menerima hal tersebut. Terdapat orang Papua menilai bahwa proses integrasi ini tidak melibatkan orang-orang Papua di dalam menentukan langkah dan proses referendum. Jumlah yang dapat mengikuti pemungutan suara Pepera juga dinyatakan sangat kecil sehingga tidak cukup kuat merepresentasikan kehendak Papua.²⁴ Bahkan, ada juga orang Papua yang menyatakan bahwa proses referendum ini bermasalah karena Papua sudah menyatakan kemerdekaannya jauh sebelum Pepera dilaksanakan, yakni pada 1961.²⁵ Perbedaan pandangan orang Papua menanggapi referendum ini memperlihatkan tidak adanya kesepakatan sejarah integrasi Papua. Bagi orang Papua yang tidak bersepakat dengan proses integrasi ini, kedatangan Indonesia dinilai sebagai bentuk kolonialisasi baru di Tanah

²³ McGibbon. 2006. *Op.cit.*, hlm. 12.

²⁴ Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa jumlah orang Papua yang terlibat di dalam Pepera terbatas karena lokasi perkampungan yang sulit diraih dan jumlah penduduk Papua yang tersebar menyulitkan proses referendum saat itu. Pemerintah RI melalui Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa hasil Pepera telah menjadi keputusan hukum internasional yang tidak bisa digugat kembali. Lihat: Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm. 61-62.

²⁵ Salah satu pihak di Papua yang menyatakan bahwa Papua telah merdeka pada 1 Desember 1961 adalah Presidium Dewan Papua (PDP). Namun demikian, Chauvel dari hasil risetnya menyatakan bahwa pada hari tersebut hanya ada pengibaran bendera dan tidak ada proklamasi kemerdekaan Papua. Oleh karena itulah, Seth Runkorem merasa perlu membuat proklamasi kemerdekaan Papua di Markas Victoria pada 1 Juli 1971. Proklamasi ini didukung juga oleh Markus Kasiepo dan Nicolas Jouwe yang paham atas sejarah Papua pada masa itu dan terlibat dalam manifest politik pada 1961. Lihat: Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm. 26; *Ibid.*, hlm. 60.

²⁰ McGibbon. 2006. *Op.cit.*, hlm. 6.

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

²² Widjojo (ed.). 2009. *Op.cit.*, hlm. 61-62.

Papua.²⁶ Situasi ini kembali memperkuat identitas kepapuaan yang antipati terhadap Indonesia.

Identitas kepapuaan kembali menguat dengan cara pengelolaan Papua oleh Pemerintahan Suharto yang tidak melibatkan elit lokal Papua dan abai terhadap kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua. Pada periode awal pasca-Integrasi Papua, beberapa elit Papua, termasuk E.J. Bonay, Herman Wayoi, Fritz Kirihio, dan Clemens Runaweri, mencoba untuk masuk ke dalam sistem Pemerintahan Indonesia, namun gagal dan tersingkir. Pemerintah Indonesia saat itu memang cenderung menolak keterlibatan orang Papua yang dianggap pro-separatis, padahal mereka memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap orang Papua.²⁷ Orang Papua terdidik yang pernah membantu pemerintahan kolonial Belanda pun tidak dilibatkan dalam pemerintahan baru di Papua. Alih-alih melibatkan orang Papua, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan migrasi yang menghadirkan pendatang di Tanah Papua untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan.²⁸ Alhasil, nuansa pendatang yang ‘menguasai’ Papua kembali menguat diantara orang-orang Papua.

Migrasi tidak hanya menjadikan para pendatang dari luar Papua sebagai birokrat dan pembuat kebijakan di dalam struktur pemerintahan daerah Papua, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi di Papua. Para migran datang ke Papua tidak hanya karena program transmigrasi pemerintah tetapi juga karena inisiatif sendiri setelah melihat peluang ekonomi di Papua. Para pendatang, yang menjadi pemilik toko, pelaku bisnis, pengelola tambang dan lainnya itu, kemudian menjadi pemain kunci ekonomi Papua.²⁹ Sementara itu, orang asli Papua terjebak pada kondisi pembangunan yang timpang, kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Hal itu dapat dilihat dari angka-angka statistik BPS yang memperlihatkan kondisi pembangunan

orang Papua yang rendah. Misalnya, data BPS pada tahun 1996 menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak Papua tidak bersekolah hingga tamat SD,³⁰ angka Indeks Pembangunan Manusia Papua pada tahun 1996 menjadi salah satu yang terendah di Indonesia,³¹ lebih dari 50% penduduk di Papua terkategori miskin pada awal tahun 1999.³² Di luar itu, orang Papua juga menghadapi persoalan pelanggaran HAM, dimana banyak diantara mereka menjadi korban kekerasan akibat penetapan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Posisi timpang antara pendatang dengan orang asli Papua berlangsung selama Papua menjadi bagian dari Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. Orang Papua merasakan bahwa *amber*/pendatang telah menjadi tuan di tanah mereka. Hal ini seperti Chauvel juga menyebutkan bahwa ‘orang Papua telah menjadi orang asing di tanah mereka sendiri.’³³ Ketimpangan ini menjadi akar persoalan yang kembali menegaskan identitas kepapuaan yang antitesis dengan identitas keindonesiaan diantara orang Papua. Artinya, meskipun Papua telah secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, identitas kepapuaan tersebut tidak kemudian luntur dan menghilang. Sebaliknya, identitas kepapuaan itu justru menguat dan menjadi salah satu hal yang mengobarkan api konflik di Tanah Papua.

Jika merunut dari apa yang telah dikaji oleh Chauvel, Drooglever, McGibbon dan Widjojo tentang identitas orang Papua, khususnya

²⁶ Widjojo (ed.). 2009. *Ibid.*, hlm. 61-62

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

²⁸ Orang-orang asli Papua hanya diberikan posisi birokrat tingkat rendah di dalam pemerintahan. Sementara itu, birokrat pembuat kebijakan pemerintah umumnya ditempati oleh para pendatang. Lihat: Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm. 47-48.

²⁹ Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm.50-51

³⁰ Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah orang Papua hanya 5 tahun, yang artinya tidak lulus SD. Membutuhkan waktu paling tidak 6 tahun bersekolah untuk dapat lulus SD. Lihat: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, *Analisis Parameter Kependudukan 2015*, (BKKBN: Jayapura, 2015), hlm. 24.

³¹ Berdasarkan data BPS, angka IPM Papua adalah 60,2 dan merupakan yang terendah setelah Nusa Tenggara Barat di Indonesia. Angka IPM rata-rata Indonesia saat itu adalah 67,7. Lihat: 5 September 2014, “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2013,” dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1516> yang diunduh pada 6 Juni 2017.

³² Pada Maret 1999 (beberapa bulan setelah Pemerintahan Suharto tumbang), BPS menyatakan terdapat 54,75% penduduk Papua terkategori miskin di Papua. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, “Keadaan Kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2016,” *Berita Resmi Statistik Papua*, No. 37/07/94 Th. VIII, 18 Juli 2016, hlm. 2.

³³ Chauvel. 2005. *Op.cit.*, hlm. 47-48.

mengenai identitas kepapuaan sebagai yang berseberangan dengan identitas keindonesiaan, maka nampak bahwa masa kolonialisasi, transisi-integrasi dan periode Pemerintahan Orde Baru adalah masa penting yang menumbuh-kembangkan identitas kepapuaan.³⁴ Terdapat tiga hal yang menjadi faktor utama sebagai pemicu lahir dan menguatnya identitas kepapuaan, yakni: sistem kolonialisasi Belanda, proses integrasi dengan keterlibatan orang Papua yang rendah, dan proses pembangunan Papua yang gagal dan meminggirkan keterlibatan orang Papua. Ketiga faktor itu berlangsung pada periodisasi berbeda, namun ketiganya memiliki pengaruh yang sama besarnya dalam memperkuat identitas kepapuaan.

Dikotomi Identitas Kepapuaan dan Keindonesiaan Pasca-Orde Baru

Jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 memberikan harapan baru bagi Indonesia, termasuk Papua. Berbagai upaya reformasi untuk mengubah dan memperbaiki pengalaman buruk di masa Orde Baru pun dilakukan oleh rezim pemerintahan demokrasi yang baru, termasuk dalam hal pengelolaan pembangunan dan konflik di Papua. Pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru telah melakukan beberapa upaya untuk membawa perubahan bagi Papua yang sekaligus ditujukan untuk menyelesaikan konflik, yakni dengan mengadakan beberapa pertemuan dengan tokoh Papua, permintaan maaf kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, menerapkan kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua, dan menerapkan desentralisasi beserta pemekaran Papua.

Jika merunut kembali pada beberapa faktor yang melahirkan dan memperkuat identitas kepapuaan (seperti telah dijelaskan sebelumnya), maka faktor yang terkait dengan pemerintah Indonesia secara langsung adalah persoalan sejarah integrasi Papua dan masalah pembangunan Papua.³⁵ Otonomi khusus bagi Papua yang diatur di dalam Undang-Undang No.

³⁴ Konteks kolonialisasi yang dimaksudkan di sini adalah ketika Belanda memegang kedaulatan atas Papua, yakni hingga masa transisi berlangsung pada 1963.

³⁵ Persoalan lainnya adalah sistem kolonialisasi yang sesungguhnya lebih terkait langsung dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu.

21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesungguhnya telah berupaya untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Kebijakan otsus Papua telah mengakomodir beberapa poin penting diantaranya kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterlibatan orang Papua dalam pembangunan Papua, pembentukan majelis representasi kultural orang asli Papua sebagai bagian dari struktur pemerintahan, pengakuan atas lambang dan lagu daerah, perlindungan hak masyarakat adat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan langkah rekonsiliasi, perlindungan dan penghormatan atas HAM di Papua, serta alokasi dana otsus untuk percepatan pembangunan Papua.³⁶

Tabel 1. Pasal-Pasal Penting di Dalam UU Otsus Papua

Pasal	Hal yang Diatur
Pasal 12, 62 (2) dan (3)	Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterlibatan orang Papua dalam pembangunan Papua
Pasal 5 (2) dan (3), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2)	Pembentukan majelis representasi kultural orang asli Papua sebagai bagian dari struktur pemerintahan
Pasal 2	Pengakuan atas lambang daerah
Pasal 20, 38, 42, 43, 64	Perlindungan hak masyarakat adat
Pasal 46	Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan langkah rekonsiliasi
Pasal 45 dan 47	Perlindungan dan penghormatan atas HAM di Papua
Pasal 34	Alokasi dana otsus untuk percepatan pembangunan Papua

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

UU Otsus bagi Papua ini sesungguhnya adalah langkah yang baik untuk menyelesaikan akar konflik dan memperbaiki hubungan Indonesia dengan Papua. Kandungan substansi UU Otsus komprehensif karena membahas hampir semua aspek yang dinilai menjadi akar konflik di Papua. Bahkan jika dibandingkan dengan UU Otsus serupa di Aceh, UU Otsus bagi Papua dinilai mengandung substansi dan bentuk otonomi yang lebih kuat. Hal ini karena orang Papua, terutama staf pemerintah daerah, akademisi Universitas Cendrawasih (Uncen) dan para aktivis terlibat langsung di dalam penyusunan draft UU Otsus. Mereka tidak hanya menyusun draft sebagai usulan untuk dibahas antara pemerintah dengan DPR,

³⁶ Untuk mengetahui poin-poin penting yang terakomodir di dalam UU Otsus secara lengkap dapat dilihat UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

namun mengikuti prosesnya hingga di DPR dan disahkan sebagai undang-undang. Dalam konteks ini, orang Papua terlibat langsung dan memiliki komitmen yang kuat untuk otonomi khusus bagi Papua.³⁷

Dengan diterapkannya UU Otsus Papua, maka diharapkan kebijakan ini dapat secara berangsur-angsur mengikis identitas kepapuaan yang antitesis dengan identitas keindonesiaan. Harapannya, otsus dapat menjadi langkah memperbaiki kesalahan pemerintahan terhadap Papua di masa lalu, sehingga mampu mempererat hubungan antara Papua dengan Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada menguatnya identitas keindonesiaan di Papua, serta menjadikan identitas kepapuaan bukan sebagai identitas yang bertolak belakang dengan identitas keindonesiaan. Era reformasi memberikan peluang perubahan atas keberadaan identitas kepapuaan yang sebelumnya selama berpuluh tahun menguat di Tanah Papua.

“Jauh panggang dari api,” itulah peribahasa yang tepat menggambarkan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi di Papua. Harapan yang tinggi bahwa kebijakan otsus dapat memperbaiki hubungan antara Indonesia dengan Papua dan untuk membangun Papua nampaknya tidak terpenuhi. UU Otsus masih menuai persoalan yang menimbulkan kekecewaan orang Papua. Persoalan ini tidak hanya muncul pasca-diterapkannya UU Otsus di Papua, namun juga sebelum UU Otsus ini ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah pusat untuk Papua.

Persoalan mendasar yang menjadi akar masalah dari UU Otsus adalah tentang sejauh mana seluruh elemen masyarakat di Papua dilibatkan di dalam penyusunan UU Otsus. Meskipun UU Otsus ini pada dasarnya disusun atas gagasan dan niat baik dari kelompok-kelompok terpelajar di Papua, yang sesungguhnya juga merupakan orang Papua; namun, sebagian kelompok lain merasa tidak terlibat di dalam proses penyusunan tersebut. Pada saat itu, elemen yang terlibat secara langsung di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus adalah aktivis Forum Kerja Sama

Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM), akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (FISIP Uncen), dan birokrat Pemerintahan Daerah (pemda) Papua.³⁸ Sementara itu, elemen lain di masyarakat hanya terlibat dalam proses diskusi dan sosialisasi saja, diantaranya meliputi: 24 akademisi (66,7%), lima tokoh masyarakat/agama/cendekiawan (13,8%), enam staf pemda, dan satu aktivis LSM (2,8%). Meskipun ada representasi, namun keterlibatan elemen tersebut hanya terbatas pada diskusi dan sosialisasi, tidak terlibat penuh dalam penyusunan langsung draft RUU Otsus.

Selain itu, kelompok pro-Papua Merdeka merasa tidak terlibat dan terwakili di dalam proses penyusunan draf RUU Otsus. Bahkan, bagi mereka, Jacob Solossa dan Frans Wospakrik yang menjadi aktor kunci penyusunan RUU Otsus dinilai sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Indonesia, bukan orang Papua. Solossa saat itu merupakan Gubernur Papua dan Wospakrik adalah Rektor Uncen. Ketidakterlibatan kelompok pro-kemerdekaan dalam penyusunan draft ini kemudian memicu aksi protes massa pada 28-29 Maret 2001, yakni ketika Forum Kajian Otsus membuat konsultasi publik di Gelanggang Olah Raga (GOR). Mereka menyatakan diri menolak otsus dan menolak berdiskusi tentang otsus.³⁹

Rendahnya keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat Papua ini pada akhirnya menimbulkan masalah legitimasi. Tidak semua orang Papua kemudian mengakui UU Otsus, khususnya mereka yang merasa tidak dilibatkan di dalam proses penyusunan UU tersebut.⁴⁰ Kekecewaan akibat tidak dilibatkannya orang Papua oleh Indonesia dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan diri dan tanah mereka kembali berulang. Situasi ini bermiripan dengan kondisi dimana tidak semua orang Papua merasa dilibatkan dalam proses integrasi Papua ke dalam Indonesia. Pengabaian terhadap keterlibatan

³⁷ Rodd McGibbon, *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?* (Washington, D.C.: East-West Center Washington, 2004), hlm. 21.

³⁸ Agus Sumule (ed.), *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 16.

³⁹ Sumule (ed.), *Ibid.*, hlm. 28-30; Muridan Widjojo dan Aisah Putri Budiatri, “UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1, (2012), hlm. 69.

⁴⁰ Widjojo dan Budiatri. 2012. *Ibid.*, hlm. 153.

orang Papua menjadi hal sensitif yang tentu saja dapat berdampak pada semakin menguatnya identitas kepapuaan.

Kekecewaan orang Papua terhadap kebijakan otonomi khusus semakin bertambah setelah UU Otsus ditetapkan. Implementasi UU Otsus tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Banyak aturan di dalam UU Otsus, bahkan, pada akhirnya gagal untuk dijalankan dan dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya, KKR yang keberadaannya ditujukan untuk mengklarifikasi persoalan sejarah politik integrasi Papua hingga saat ini tidak terbentuk. Padahal, eksistensi komisi ini penting untuk memecah kebuntuan status politik yang selalu menjadi perdebatan antara Pemerintah Indonesia dengan orang Papua. KKR batal dibentuk karena UU 27/2004 tentang KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses Judicial Review pada tahun 2006. Keputusan MK saat itu merekomendasikan untuk membentuk UU KKR yang baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum HAM internasional, namun proses penyusunan UU KKR baru tidak berjalan hingga hari ini.⁴¹

Tidak hanya batal dilaksanakan, beberapa pasal di dalam UU Otsus pun banyak diantaranya yang tertunda-tunda implementasinya. Sebagai contoh, pembentukan MRP yang tertunda selama empat tahun sejak UU Otsus disahkan akibat Pemerintah Indonesia menduga bahwa MRP akan menjadi lembaga *superbody* yang akan mempercepat kemerdekaan Papua. Selain keterlambatan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pembentukan MRP, Pemerintah Indonesia juga dinilai tidak sepenuhnya mendukung kinerja MRP. MRP sejak berdiri kemudian dibiarkan bekerja sendiri tanpa pedoman dan asistensi dari pemerintah, sehingga akhirnya berbagai keputusan yang dikeluarkan MRP diterima oleh rakyat tetapi ditolak oleh pemerintah.⁴²

⁴¹ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Policy Brief: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, (Jakarta: ELSAM, 2015), hlm. 2-3.

⁴² Eri Sutrisno, *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2005-2010*, (Jayapura: Suara Perempuan Papua, 2010), hlm. xii.

Selain gagal dijalankan dan tertunda implementasinya, berbagai kebijakan yang diatur di dalam otsus juga dinilai tidak berjalan efektif oleh berbagai pihak, termasuk oleh orang Papua sendiri. Hal yang amat signifikan nampak adalah kondisi pembangunan di Papua yang masih tertinggal, meskipun dana otsus yang digelontorkan oleh pemerintah sudah sangat besar. Sejak tahun 2002 hingga 2015, dana otsus yang digabungkan dengan dana infrastruktur untuk Provinsi Papua telah mencapai angka Rp 52, 636,529,793,000, sementara untuk Provinsi Papua Barat sejak 2009 hingga 2015 telah mencapai Rp 15,206,000,000,000.⁴³ Namun demikian, hingga saat ini, Papua masih dirundung berbagai persoalan pembangunan diantaranya: (1) Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia,⁴⁴ (2) indeks pembangunan manusia (IPM) Papua dan Papua Barat merupakan yang terendah di Indonesia dengan angka IPM berada di bawah rerata angka IPM di Indonesia,⁴⁵ (3) Angka pengangguran di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia,⁴⁶ (4) jumlah fasilitas

⁴³ Data disampaikan oleh Mayjen TNI Yoedhi Swastono, Deputi I Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), dalam Pertemuan Eksploratif Papua ke-7 di Sentul pada 19 November 2015.

⁴⁴ Berdasarkan pada data BPS tahun 2015, persentase penduduk miskin di Papua mencapai 27,8% dan di Papua Barat menjadi 27,8%. Padahal, rata-rata persentase penduduk miskin di Indonesia saat itu adalah 10,96%. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm. 176.

⁴⁵ Merujuk pada data BPS tahun 2013, IPM Papua mencapai 66,25 dan Papua Barat sebesar 70,62, dengan rerata IPM Indonesia mencapai 73,81. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm. 181.

⁴⁶ Berdasarkan angka BPS pada tahun 2014, angka pengangguran Papua mencapai 78,67 dan merupakan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Sementara itu, angka pengangguran Papua Barat mencapai 68,30 di atas rata-rata Indonesia sebesar 66,60. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm. 102.

pendidikan (sekolah) yang rendah,⁴⁷ dan (5) jumlah fasilitas kesehatan yang rendah.⁴⁸

Otsus yang mengandung banyak masalah dalam implementasinya meningkatkan ketidakpercayaan orang Papua atas itikad baik pemerintah Indonesia untuk membangun Papua melalui otsus.⁴⁹ Ketidakpercayaan ini terlihat dari cara-cara simbolik yang dilakukan oleh orang Papua untuk mengembalikan otsus kepada Indonesia. Pada 12 Agustus 2005, ribuan orang Papua yang dimotori oleh Dewan Adat Papua dan organisasi mahasiswa membawa peti mati sebagai simbol pengembalian otsus Papua kepada Indonesia. Hal ini berlanjut pada 18 Juni 2010 dimana Forum Demokrasi (Fordem) melakukan aksi pengembalian otsus yang sama. Kegagalan otsus membangun Papua menjadi alasan mengapa identitas kepapuaan yang antitesis dengan Indonesia tidak semakin pudar, tetapi justru cenderung menguat.

Identitas kepapuaan ini tidak hanya dipengaruhi kegagalan otsus saja, tetapi juga

⁴⁷ Berdasarkan data BPS, dari total jumlah desa/kelurahan sebanyak 3619 desa/kelurahan di Papua pada tahun 2013, hanya 1979 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) dan 518 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) (data 2014). Sementara itu, dari 1567 desa/kelurahan di Papua Barat pada 2012, hanya 825 desa/kelurahan yang memiliki SD dan 233 desa/kelurahan yang memiliki SMP (data 2014). Lihat: BPS. "Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013," dalam <http://papua.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8> yang diunduh pada 13 Juni 2017; Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Ibid.*, hlm. 144; BPS Papua Barat, *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2015*, (Manokwari: BPS Papua Barat, 2015), hlm. 2.

⁴⁸ Berdasarkan data BPS, dari total jumlah desa/kelurahan sebanyak 3619 desa/kelurahan di Papua pada tahun 2013, hanya 386 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas dan 983 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu (data 2014). Sementara itu, dari 1567 desa/kelurahan di Papua Barat pada 2012, hanya 144 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas dan 434 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu (data 2014). Lihat: BPS. "Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013," dalam <http://papua.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8> yang diunduh pada 13 Juni 2017; Badan Pusat Statistik (BPS), 2015 *Ibid.*, hlm. 158; BPS Papua Barat, 2015 *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁹ Pernyataan bahwa otsus Papua gagal, bukan berarti menihilkan sama sekali keberhasilan yang dicapai oleh otsus di Papua. Terdapat beberapa capaian yang cukup baik dari otsus di Papua, misalnya terkait dengan aksi afirmasi untuk pelibatan orang asli Papua (OAP) di ruang-ruang publik, khususnya posisi-posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif. Saat ini kepala daerah di Papua adalah OAP dan telah banyak juga OAP menjadi anggota legislatif daerah.

beberapa langkah implementasi kebijakan pemerintah di Papua yang lain. Salah satu kebijakan kontroversial Pemerintah Indonesia di tanah Papua adalah kebijakan pemekaran. Sejak awal reformasi, pemerintah menggagas agar provinsi Papua dipecah menjadi beberapa provinsi. Presiden B.J. Habibie menerapkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah serta beberapa kabupaten/kota, yang kemudian didukung dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD) Prov. Irian Jaya No. 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Namun, upaya pemekaran ini ditolak oleh demonstrasi besar orang Papua pada 14 Oktober 1999. Meski sempat ditanggguhkan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengaktifkan kembali kebijakan pemekaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2003, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Provinsi Papua Barat.⁵⁰ Pemerintah Pusat menyatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendekatkan kehadiran pemerintah dengan masyarakat di Papua, namun demikian bagi orang Papua kebijakan ini dilihat hanya untuk memecah belah mereka.⁵¹ Bagi Orang Papua, kebijakan pemekaran provinsi ini tidak didasarkan pada gagasan orang Papua, tetapi dari pusat semata. Mereka pun melihat kebijakan ini sebagai upaya melemahkan persatuan orang Papua.⁵² Pandangan negatif ini pada akhirnya semakin menjadi alasan lain mengapa identitas kepapuaan akhirnya semakin kuat di Papua.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia dianggap ingkar janji terhadap orang Papua untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Sesuai amanah UU Otsus Papua, pemerintah seharusnya melindungi HAM orang Papua, serta berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan

⁵⁰ Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), "Provinsi Papua Barat," dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/92/papua-barat> yang diunduh pada 14 Juni 2017.

⁵¹ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: CIRES dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 136-137.

⁵² McGibbon, 2004, *Op.cit.*, hlm. 9-11.

HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang yang seharusnya dibentuk sesuai UU Otsus, pada kenyataannya tidak pernah ada hingga saat ini. Sebaliknya, kejadian pelanggaran HAM justru secara berulang terjadi di era reformasi ini, termasuk kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014).⁵³ Merespon hal ini, pada 19 Mei 2016, Pemerintahan Jokowi beritikad baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dengan janji akan menyelesaikan 11 kasus HAM, termasuk kasus Biak Numfor (1998), Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014); namun, hal ini tidak memiliki kemajuan apapun sampai saat ini. Kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM di Papua menciptakan kekecewaan yang besar bagi orang Papua. Bagi mereka, janji itu hanya “tipu-tipu” yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah memang telah mengabaikan ratusan korban orang Papua.⁵⁴ Ketidaksukaan mereka terhadap Indonesia semakin meningkat, hingga akhirnya menguatkan identitas kepapuaan yang melekat pada diri orang Papua.

Era reformasi yang menjanjikan perubahan terhadap Papua melalui kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan otsus, seharusnya dapat memperbaiki hubungan Indonesia dengan Papua. Beberapa persoalan yang menjadi akar dari kemunculan dan meningkatnya identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan seharusnya dapat diakhiri, terutama terkait dengan persoalan sejarah integrasi dan kegagalan

pembangun di Papua pada masa Orde Baru. Namun sebaliknya, kebijakan-kebijakan pasca-Orde Baru justru membawa persoalan baru yang menguatkan kembali identitas kepapuaan. Pelekatan diri orang Papua sebagai bagian dari orang Indonesia semakin jauh dari harapan karena orang Papua menilai Pemerintah Indonesia ‘lagi-lagi’ abai dengan mereka. Kebijakan terhadap Papua dianggap sebagai ‘pemberian pusat’ yang tiba-tiba hadir di Papua tanpa melibatkan orang Papua dalam penyusunannya. Tidak hanya itu, orang Papua pun merasa diabaikan oleh Pemerintah akibat janji-janji untuk membangun Papua dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM tidak ditepati secara penuh.

Menguatnya identitas kepapuaan termanifestasi dalam pandangan-pandangan antagonis tentang Indonesia, aksi protes terhadap pemerintah, hingga konflik yang berujung pada upaya referendum atau merdeka bagi Papua. Pandangan antagonis muncul terhadap pemerintahan terlihat dari penilaian pesimistis orang-orang Papua terhadap upaya pemerintah untuk pembangunan Papua. Rakyat melakukan penolakan terhadap Otsus, menyatakan pemerintah setengah hati membangun Papua, hingga menyatakan bahwa saat ini orang Papua tidak berjiwa Indonesia.⁵⁵ Rangkaian aksi memprotes pemerintah pun tak putus dilakukan oleh banyak kelompok di Papua. Mulai dari yang hendak mengembalikan otsus, hingga yang menuntut kemerdekaan. Pandangan antagonis dan aksi ini secara lebih terbuka terlihat pada era reformasi dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini tidak semata-mata karena menguatnya kekuatan identitas kepapuaan saja, tetapi dipengaruhi juga oleh diterapkannya sistem demokrasi yang memberi ruang kebebasan sipil secara lebih luas.

⁵³ Berdasarkan catatan Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham), sejak 1998 hingga 2016 terdapat ratusan kasus pelanggaran HAM di Papua. Dari ratusan kasus pelanggaran HAM tersebut, hanya ada satu kasus yang berhasil dibahas di dalam sidang pengadilan HAM di Makassar, yakni kasus penyerangan terhadap Polsek Abepura pada Desember 2000. Persidangan itu dilakukan tertutup dan memutuskan tersangka, yakni Komisaris Polisi Daud Sihombing dan Kepala Brimob Papua Johny Wainal Usman, dibebaskan dan mendapatkan pemulihan nama baik. Lihat: “Elsham: Ratusan Kasus HAM di Papua, Cuma Satu yang Diadili,” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/078768957/elsham-ratusan-kasus-ham-di-papua-cuma-satu-yang-diadili> yang diunduh pada 14 Juni 2017.

⁵⁴ Dedy Istanto, 18 Februari 2016, “Aksi Kamisan Tagih Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM,” dalam <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/aksi-kamisan-tagih-jokowi-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham> yang diunduh pada 14 Juni 2017; Thomas Ch. Syufi, *Bunga Rampai Indonesia: Sebuah Proposal Ringkas Papua*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 160.

⁵⁵ Fandri Yuniarti, *Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 81-83; Paul Makugoru, “Sinyal Separatisme dari Kantong Kristen,” dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, (16-31 Juli 2007), hlm. 3; Paul Makugoru, “Kami Mau Hidup Bebas di Tanah yang Tuhan Beri,” dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, (16-31 Juli 2007), hlm. 5; Victor Silaen, “Suara-Suara Separatisme Itu,” dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, (16-31 Juli 2007), hlm. 6; 10 Januari 2016, “Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia,” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/10/078734620/gubernur-papua-belum-ada-orang-papua-berjiwa-indonesia> yang diunduh pada 17 Juni 2017.

Kegagalan otsus dan kebijakan reformasi untuk Papua lainnya menjadikan orang-orang Papua yang kecewa terhadap pemerintah Indonesia melihat dirinya sebagai kaum tertindas yang harus berkonsolidasi untuk mewujudkan kemerdekaan Papua. Konsolidasi ini kemudian menguat dan berwujud pada berbagai gerakan baru pro-referendum Papua dan/atau pro-Papua Merdeka, termasuk Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua).⁵⁶ Berbeda dengan gerakan politik ‘generasi tua’ yang terfragmentasi dan tidak solid, gerakan baru yang umumnya digagas oleh anak muda Papua ini berupaya untuk berafiliasi dan bersatu. Upaya persatuan gerakan inilah yang kemudian menginisiasi semua gerakan politik untuk bermuara pada the *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), yakni organisasi koordinatif dari berbagai organisasi yang mengangkat isu Papua di tingkat internasional.⁵⁷

ULMWP saat ini bergerak mencari dukungan banyak pihak di luar negeri untuk referendum Papua, khususnya negara-negara Melanesia. ULMWP, bahkan, saat ini telah menjadi anggota observer dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sejak Juni 2015. Kawasan negara Melanesia menjadi target utama ULMWP bukan tanpa alasan. Hal ini terkait dengan identitas yang ingin dibentuk oleh mereka bahwa orang Papua adalah bagian dari keluarga Melanesia, bukan bagian dari Indonesia.⁵⁸

⁵⁶ Gerakan baru yang dimaksud dalam hal ini adalah gerakan dan organisasi pergerakan yang baru muncul pada era reformasi ini, yakni sejak 1998 sampai sekarang. Gerakan ini belum ada pada masa Orde Baru. Lihat: Arnold Belau, 27 Juli 2016, “Refleksi 18 Tahun HUT Aliansi Mahasiswa Papua,” dalam <http://suarapapua.com/2016/07/27/refleksi-18-tahun-hut-aliani-mahasiswa-papua/> yang diunduh pada 17 Juni 2017; Prima Gumilang, 30 Desember 2015, “Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua,” dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230070757-20-101091/perang-politik-tak-akan-usai-hingga-jakarta-beri-hak-papua/> yang diunduh pada 17 Juni 2017; Adriana Elisabeth, dkk., “Executive Summary: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map,” yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map,” di LIPI pada 14 Oktober 2016, hlm. 16-18.

⁵⁷ Adriana Elisabeth, dkk. 2016. *Ibid.*, hlm. 18-21.

⁵⁸ Berdasarkan pada wawancara antara Coen Husain Pontoh dengan Octovianus Mote (Sekretaris Jenderal ULMWP) pada

Orang Papua mengangkat isu ras sebagai pembeda dengan Indonesia dan menjadikan mereka bagian dari rumpun di negara-negara Pasifik sebagai cara untuk menyatakan bahwa mereka adalah ‘lian di Indonesia.’ Identitas kepapuaan menguat dengan tidak lagi hanya mengusung isu ‘ketidaksukaan’ dan ‘kebencian’ atas tindakan Pemerintah Indonesia dan *amber* (pendatang) di Tanah Papua, tetapi membawa gagasan identitas ras ‘melanesia’ yang berbeda dengan Indonesia, dimana mayoritas orang Indonesia memiliki ras melayu. Situasi ini menunjukkan adanya perluasan makna dari identitas kepapuaan sebagai antitesis dari identitas keindonesiaan yang berkembang pada era reformasi ini.

Terbentuknya gerakan-gerakan Papua yang lebih solid menandakan adanya kebangkitan identitas kepapuaan pada satu dekade terakhir. Identitas kepapuaan ini menguat setelah sebelumnya sempat melemah ketika identitas ‘orang gunung versus orang pantai’ dan antarsuku cenderung menguat pada tahun-tahun awal otsus diterapkan. Identitas orang gunung versus orang pantai dan antarsuku ini menguat bukan tanpa alasan, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan otsus Papua. Aksi afirmasi dalam otsus yang memberikan peluang orang Papua untuk mengisi jabatan politik menjadikan persaingan antar-suku sesama orang asli Papua berwatak ‘etnosentrisme sempit’ semakin menajam.⁵⁹ Para elit Papua yang menempati posisi penting sebagai birokrat maupun legislator mempertahankan kekuasaannya dengan menempatkan diri mereka sebagai *big man* atau patron yang menjaga loyalitas konstituen yang berasal dari suku atau klennya sendiri.⁶⁰ Kondisi ini menjadi persaingan antar-orang Papua sendiri semakin menguat.

Meskipun sempat menguat, namun identitas kesukuan ini nampak melemah kembali setelah

25 Mei 2016. Lihat: “Sekjen ULMWP: Pemerintah Indonesia itu Penjajah Bagi Orang Papua,” dalam <http://www.tabloid-wani.com/2016/09/sekjen-ulmwp-pemerintah-indonesia-itu-penjajah-bagi-orang-papua.html> yang diunduh pada 18 Juni 2017.

⁵⁹ Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura, *Memoria Passionis di Papua*, (Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura, 2005), hlm. 160.

⁶⁰ McGibbon, 2004, *Op.cit.*, hlm. 37.

soliditas gerakan-gerakan politik di Papua menguat. Identitas kepapuaan yang berbeda dengan identitas keindonesiaan mengkristal kembali, sementara wacana tentang sentimen ‘orang gunung versus orang pantai’ atau antar-suku/klen mulai tereduksi. Narasi yang diusung oleh gerakan-gerakan politik di Papua adalah persatuan orang Papua dengan tidak lagi membawa perbedaan suku atau klen. Oleh karena itulah, identitas kepapuaan kembali menajam di tengah upaya memperkuat gerakan politik Papua yang solid, khususnya setelah ULMWP dibentuk dan dinyatakan sebagai anggota pengamat MSG.

Sepuluh tahun terakhir memperlihatkan dinamika semakin mengerasnya identitas kepapuaan sebagai antitesis dengan identitas keindonesiaan. Namun demikian, menguatnya identitas kepapuaan ini tidak terlepas dari apa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Papua sejak awal era reformasi dimulai. Kegagalan otsus dan kebijakan pembangunan Papua pasca-Orde Baru berkontribusi besar pada situasi tersebut. Janji perubahan di Tanah Papua, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM, pun tidak kunjung ditepati sehingga menimbulkan kekecewaan besar orang Papua terhadap Pemerintah. Karena itulah, identitas kepapuaan yang semakin menguat tak terhindarkan lagi. Kondisi ini semakin buruk karena narasi identitas kepapuaan tidak lagi hanya tentang orang Papua yang kecewa, marah, tidak suka dan/atau ‘benci’ dengan Indonesia, tetapi lebih dari itu, Papua bukan bagian dari Indonesia. Narasi identitas bahwa orang Papua adalah bagian dari komunitas melanesia dan bukan Indonesia menjadikan jarak dikotomi antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan semakin jauh.

Penutup

Dalam literatur-literatur pendahulu mengenai dikotomi identitas di Tanah Papua, era kolonialisasi, masa transisi serta Orde Baru menjadi fokus kajian. Pada periode waktu tersebut, identitas kepapuaan sebagai bukan bagian dari identitas keindonesiaan, atau antitesis dengan identitas keindonesiaan lahir dan berkembang. Berangkat dari kajian yang dilakukan oleh Chauvel, Drooglever, McGibbon dan Widjojo, pertumbuhan-kembang identitas kepapuaan

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: sistem kolonialisasi yang membentuk kebencian orang Papua atas orang Indonesia, proses integrasi dengan keterlibatan orang Papua yang rendah, dan proses pembangunan Papua yang gagal dan meminggirkan keterlibatan orang Papua. Ketiga faktor ini menjadi hal yang secara terus-menerus memupuk identitas kepapuaan yang berseberangan dengan identitas keindonesiaan selama bertahun-tahun, bahkan berabad lamanya.

Identitas kepapuaan yang antitesis dengan identitas keindonesiaan tidak terhenti perkembangannya meski Pemerintah Indonesia telah memulai lembaran baru untuk membangun Papua pada era reformasi. Otsus dan kebijakan pemerintah lain yang seharusnya mampu mengikis dikotomi identitas ini nyatanya gagal menghilangkan narasi antagonis tentang Indonesia. Alih-alih membuat identitas kepapuaan sebagai bagian dari identitas keindonesiaan, kebijakan dan komitmen pemerintah yang dinilai setengah hati menjalankannya justru membuat orang Papua semakin menjauh dari Indonesia. Situasi ini diperburuk lagi oleh narasi baru tentang identitas kepapuaan yang tidak lagi hanya tentang kekecewaan dan kebencian dengan Indonesia, tetapi narasi bahwa orang Papua bukan bagian dari Indonesia karena ras-nya yang berbeda dengan mayoritas orang Indonesia lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Chauvel, Richard. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington, D.C.: East-West Center Washington. 2005.
- Chauvel, Richard and Ikrar Nusa Bhakti. *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*. Washington D.C.: East-West Center Washington. 2004.
- Drooglever, Pieter. *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua*. Oxford, UK: Oneworld Publications. 2009.
- Hadi, Syamsul, Andi Widjajanto, dkk. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIRES dan Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Sumule, Agus (ed.). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Sutrisno, Eri. *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2005-2010*. Jayapura: Suara Perempuan Papua. 2010.

Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura. *Memoria Passionis di Papua*. Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura. 2005.

Widjojo, Muridan S. (ed.). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia. 2009.

Yuniarti, Fandri. *Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.

Jurnal dan Dokumen

Al Rahab, Amiruddin. "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke-Papua-an Versus Ke-Indonesia-an," *Jurnal Dignitas*, Vol. III, No. 1. 2005.

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua. "Keadaan Kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2016," *Berita Resmi Statistik Papua*, No. 37/07/94 Th. VIII, 18 Juli 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: BPS. 2015.

BPS Papua Barat. *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2015*. Manokwari: BPS Papua Barat. 2015.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua. *Analisis Parameter Kependudukan 2015*. BKKBN: Jayapura. 2015.

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Policy Brief: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Jakarta: ELSAM. 2015.

Hernawan, Budi J. "Terror, Resistance, and Trauma in Papua (Indonesia)," *Centre for International Governance and Justice Issues Paper 14*. 2009.

Honhe, Markus V. "Political Identity, Emerging State Structures and Conflict in Northern Somalia," *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 44, No. 3, September, 2006.

Huddy, Leonie. "From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory," *Political Psychology*, Vol. 22, No. 1, Maret, 2001.

Makugoru, Paul. "Sinyal Separatisme dari Kantong Kristen," dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, 16-31 Juli 2007.

Makugoru, Paul. "Kami Mau Hidup Bebas di Tanah yang Tuhan Beri," dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, 16-31 Juli 2007.

McGibbon, Rodd. *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?* Washington, D.C.: East-West Center Washington.

McGibbon, Rodd. *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Place in Australia-Indonesia Relations*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy. 2006.

Silaen, Victor. "Suara-Suara Separatisme Itu," dalam *Tabloid Reformata*, Edisi 63, Tahun V, 16-31 Juli 2007.

Widjojo, Muridan, dan Aisah Putri Budiatri. "UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 1. 2012.

Internet

Belau, Arnold. 27 Juli 2016. "Refleksi 18 Tahun HUT Aliansi Mahasiswa Papua," <http://suarapapua.com/2016/07/27/refleksi-18-tahun-hut-aliansi-mahasiswa-papua/>, diunduh pada 17 Juni 2017.

Gumilang, Prima. 30 Desember 2015. "Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua," <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230070757-20-101091/perang-politik-tak-akan-usai-hingga-jakarta-beri-hak-papua/>, diunduh pada 17 Juni 2017.

5 September 2014. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2013." *BPS*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1516>, diunduh pada 6 Juni 2017.

10 Januari 2016. "Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia," <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/10/078734620/gubernur-papua-belum-ada-orang-papua-berjiwa-indonesia>, diunduh pada 17 Juni 2017.

"Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013," <http://papua.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8>, diunduh pada 13 Juni 2017.

"Provinsi Papua Barat," <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/92/papua-barat>, diunduh pada 14 Juni 2017.

"Sekjen ULMWP: Pemerintah Indonesia itu Penjajah Bagi Orang Papua," <http://www.tabloid-wani.com/2016/09/sekjen-ulmwp-pemerintah-indonesia-itu-penjajah-bagi-orang-papua.html> diunduh pada 18 Juni 2017.

“Elsham: Ratusan Kasus HAM di Papua, Cuma Satu yang Diadili,” <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/06/078768957/elsham-ratusan-kasus-ham-di-papua-cuma-satu-yang-diadili>, diunduh pada 14 Juni 2017.

Adriana Elisabeth, dkk. “Executive Summary: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map,” yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map,” di LIPI pada 14 Oktober 2016, hlm. 16-18.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Wasisto Raharjo Jati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Dina Fadiyah

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: dinafadiyah@hotmail.com

Septi Satriani

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: septisatriani@gmail.com.

Siswanto

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui sish_jakarta@yahoo.com.

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Anggi Afriansyah

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhar, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan gusdurian.net. Dapat dihubungi melalui afriansyah.anggi@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

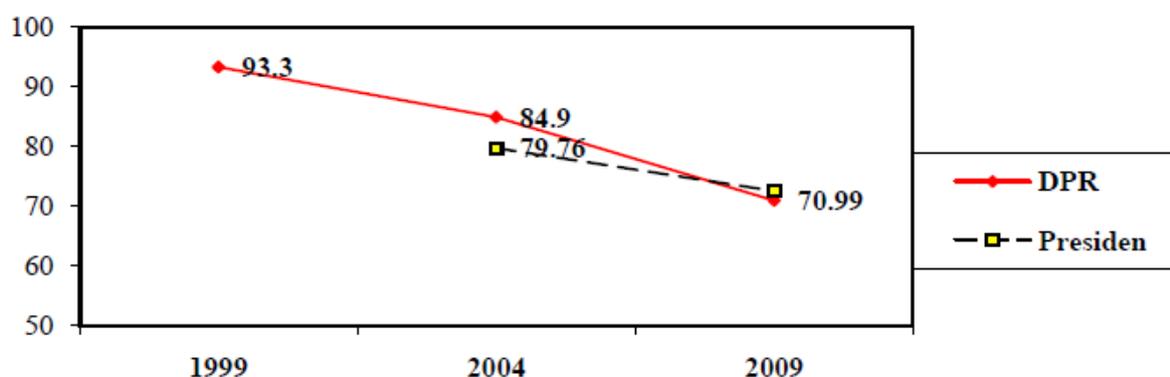
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

